

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERBANDINGAN ANTARAPEMIKIRAN A. MUKTI ALI DAN AZYUMARDI AZRA TENTANG KONSEP MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM**

Setelah peneliti melihat pemikiran kedua tokoh tersebut tentang konsep modernisasi pendidikan Islam, maka pada bab ini, merupakan sebuah langkah akhir dan menjadi inti dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis perbandingan tentang konsep modernisasi pendidikan Islam antara pemikiran A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra. Sebagaimana yang sudah tertera dalam rumusan masalah bahwa analisis perbandingan ini dilakukan dengan menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut dengan melihat perbedaan dan persamaan diantara keduanya. hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana letak perbedaan dan persamaan diantara keduanya. selanjutnya, peneliti menambahkan seputar keunggulan pemikiran diantara keduanya.

#### **A. Konsep Modernisasi Pendidikan Islam**

Persentuhan masyarakat Barat dengan peradapan Islam yang juga menyentuh pada pengungkapan kembali alam pikiran Yunani dan Romawi tersebut membawa pada implikasi konstruktif, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fungsi rasio dalam pandangan hidup di Eropa Barat. Konsekuensi logisnya adalah pertumbuhan dan

perkembangan ilmu pengetahuan mendapatkan dukungan yang kuat untuk maju. Perkembangan dalam peta pemikiran ini merupakan perubahan besar dalam kehidupan waktu itu yang mengubah tatanan peradaban baru. Akhirnya, pada abad ke-18 M masyarakat Eropa telah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia dan telah menggantikan peradaban Islam yang pada abad ke-16 M mengalami masa surutnya.<sup>143</sup>

Timbulnya modernisasi pendidikan Islam di Indonesia tentu tidak terlepas dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung di dunia barat. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pembaharuan, baik di bidang politik, sosial, dan pendidikan juga tidak terlepas dengan terjadinya pembaharuan di dalam pemikiran Islam itu sendiri, terutama diawali oleh pembaharuan pemikiran islam yang timbul di Mesir, Turki, dan India.

Dari berbagai kenyataan yang telah terjadi, maka tidak bisa di pungkiri bahwa sanya bangsa Eropa lebih unggul dibandingkan dengan bangsa Mesir, Turki, dan India. Kontak yang dilakukan bangsa Eropa menimbulkan sebuah kesadaran bagi masyarakat terutama bagi tokoh-tokoh muslim tentang kemajuan Eropa dan ketinggal kita. maka dari itu, sebuah pembaharuan sangatlah penting untuk di aplikasikan dalam mengejar ketertinggalan umat muslim. Meskipun, di dalam pembaharuan itu sendiri masih terjadi sebuah diskursus bagi umat muslim.

---

<sup>143</sup>Ninik Masruroh & Umiarso, *Modernisasi Pnedidikan Islam ala Azyumardi Azra*, (Yogyakarta: Aruzz Media, 2011), 70

Gaugan pembaharuan sampai terdengar ke Indonesia, dimana pada awal abad ke-20 bermunculan tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Para pembaharu ini banyak bergerak di bidang organisasi, politik, sosial, dan Pendidikan. seperti: Syekh Jamil Jambek, Syekh Thaher Jalaluddin, Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Syekh Ibrahim Musa, Zainuddin Labai Al-Yunusi, yang kesemuanya dari tanah Minangkabau. Dari para tokoh pembaharu diatas, maka gaugan pembaharuan di Indonesia semakin pesat dan menyebar luas di seluruh Indonesia.

Selain di tanah Minangkabau, di tanah Jawa juga terjadi sebuah pembaharuan. Para pembaharu di Jawa juga sama dengan para pembaharu di Minangkabau yaitu bergerak di bidang organisasi, politik, sosial, dan pendidikan. Para peopor pembaharuan di Jawa seperti: KH. Ahmad Dahlan (Muhamadiyah), A. Hassan (Persis), Haji Abdul Halim dengan gerakan persatuan, dan KH. Hasyim As'aryi (NU). Para tokoh ini banyak bergelut dengan bidang pendidikan yang akhirnya memunculkan upaya-upaya untuk melakukan pembaharuan di dalam pendidikan dengan tujuan untuk mencetak generasi bangsa yang dapat bersaing dikemudian hari.

## **B. Konsep Modernisasi Pendidikan Islam Menurut A. Mukti Ali dan Azyumardi**

### **Azra**

#### **1. Pesantren Menurut A. Mukti Ali**

Sekalipun corak pondok pesantren itu bermacam-macam, namun satu hal yang sama ialah bahwa di pondok pesantren itu ditekankan pendidikan dan pengajaran Agama Islam. Dengan itu, maka jelas pondok pesantren yang lebih menekankan kepada proses pendidikan dan pengajaran Agama Islam dan inilah ciri khas dari pondok pesantren, dan memang untuk itulah pesantren didirikan.

Konsep modernisasi pesantren menurut A. Mukti Ali. Dalam perjalanan sejarah, pada permulaan abad XX sistem pengajaran di pondok pesantren itu mengalami perubahan menjadi madrasah, yaitu sistem pengajaran yang memakai jenjang, ada ujian, ada absensi, ada rapot, dan sebagainya. Sudah barang tentu dilihat dari segi pengajaran, sistem madrasah ini jauh lebih baik dari pada sistem *wetonan* dan *sorongan*. Karena pengajaran dengan sistem madrasah itu berjenjang dan kecakapan santri dapat diukur dan diketahui.

Saya kira sistem pendidikan dan pengajaran Agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren, sedangkan sistem pengajaran yang mengikuti sistem madrasah, jelasnya *madrasah dalam pondok pesantren adalah bentuk sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam yang paling baik di Indonesia ini.*<sup>144</sup>

Dalam hal, modernisasi lembaga pesantren, A. Mukti Ali tetap menjaga kemandirian pesantren dengan mempertahankan sistem atau bahkan kurikulum yang sudah berjalan, keinginannya untuk membawa pesantren ke pusat perhatian

---

<sup>144</sup>A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 25

pemerintah Orde Baru sangat besar. Melalui SKB menteri Agama dengan Menteri pertanian No. 34 A Tahun 1972, mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan pondok pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Kerja sama itu juga dilakukan dengan departemen-departemen lain, yang intinya ditujukan dengan untuk memberikan pembinaan-pembinaan manajerial bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam.<sup>145</sup>

## 2. Madrasah Menurut A. Mukti Ali

Dalam hal Madrasah ini, Mukti Ali telah melakukan kebijakan tentang pembenahan lembaga pendidikan Islam. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mengambil inisiatif untuk merebut berbagai rencana itu dengan departemen lain, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah melalui proses panjang dan hati-hati, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, No. 6 Tahun 1975, dan No.037/U/a975. Dalam SKB Tiga Menteri tersebut ditegaskan: (1) Agar ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang singkat; (2) Agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas; dan (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran Agama. Melalui kebijakan SKB ini paling kurang ada dua hal pending bagi masa depan pendidikan Islam di

---

<sup>145</sup>Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 353

Indonesia. *Pertama*, dalam jangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. *Kedua*, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara demikian, pengakuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat.<sup>146</sup>

Maka dengan demikian, uraian dalam analisis ini, penulis masih begitu jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masih butuh sebuah kajian yang lebih mendalam lagi tentang pemikiran A. Mukti Ali yang dalam hal ini tentang modernisasi pendidikan Islam. Tapi, yang perlu dicatat dalam pemikiran A. Mukti Ali --kontribusi kebijakan pendidikan yang telah beliau laksanakan dan pada saat ini telah kita rasakan hasilnya.

### 3. Pesantren Menurut Azyumardi Azra

Pesantren dan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi sektor atau lahan garapan besar dari modernisasi pendidikan Islam. Sebab, institusi tersebut sebagai representasi dari lembaga pendidikan Islam yang menjadi *institution of central Islamic studies*. Oleh sebab itu, lembaga ini harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara umum terutama masyarakat Muslim Indonesia. Harapan dan kebutuhan masyarakat Muslim terhadap pendidikan Islam sangat besar ke depan masyarakat Muslim akan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan penuh

---

<sup>146</sup> Ibid., 352-353

tantangan. Maka dari itu, tidak ada jalan lain sebagai modus untuk menjawab tantangan kebutuhan sekaligus persaingan yang hingga pada masyarakat Muslim modern dengan jalan modernisasi kelembagaan pendidikan Islam.

Sebagai suprastruktur dari kelembagaan pendidikan Islam, pesantren dan madrasah tidak lepas dari sistem dan perangkat lunak lainnya yang menjadi anatomi struktur kelembagaan. Oleh karena itu, perangkat lunak yang menjadi sasaran proyek dalam rangka modernisasi harus diformulasikan dengan jelas dan komprehensif. Tentunya hal tersebut disesuaikan dengan khazanah-khazanah serta nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat dan tidak melepaskan nilai-nilai lama. Bahkan, hal itu dijadikan sebagai tradisi konstruktif yang telah klasik untuk dijadikan pegangan dalam menghadapi era ke depan, terutama yang berkaitan dengan globalisasi di segala lini. Komponen penting dari pendidikan Islam adalah sistem kurikulum, pertama kali yang akan menjadi pembahasan dalam rangka modernisasi ini adalah komponen di atas tadi. Dengan demikian, tidak akan cukup hanya dengan wacana saja, tetapi butuh konstruksi dan formulasi yang jelas untuk melihat kaitan-kaitan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bila dilacak dari sisi metodologi, ternyata pemikiran Azyumardi Azra, masih sebatas wacana yang mengimbang<sup>147</sup>. Sebab, dari perspektif yang ditawarkannya masih berupa anjuran dan rujukan untuk memnuka jalan baru terhadap kerangka

---

<sup>147</sup>Ninik Masruroh & Umiarso, *Modernisasi Pendidikan Islam ala Azyumardi Azra*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 230

modernisasi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Maka, dalam hal ini Azyumardi Azra, walau dalam dataran fakta, ia mengungkapkan secara gamblang tentang sisi pesantren, namun tidak memberikan apresiasi yang tinggi terhadap khas pendidikan Indonesia ini. Sebab, dari sisi pemaparan cenderung melihat pesantren dari sudut pandang negatif sehingga kesan dari karyanya cenderung tendensius. Seharusnya, ruang dialogis terhadap khazanah pesantren ditempatkan pada porsi yang besar sehingga pesantren dengan kekurangan dan kelebihan mampu mendongkrak pendidikan khas Indonesia, bukan malah menggali jurang kekurangan pesantren dan menutup jurang kekurangan dengan kelebihan.

Karya Azyumardi Azra banyak menyinggung kepemimpinan pesantren yang terlalu otoritatif. Pemimpin pesantren terlalu dipandang sebelah mata dan sangat berat sebelah, bahkan negatif. Padahal, sumbangan mereka sangat besar bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Setidaknya, para pemimpin tersebut diberikan apresiasi yang tinggi atas jasa-jasanya dalam dunia pendidikan bukan malah mengorek kekurangannya.

Disamping itu pula, dia terlalu memuji, bahkan mengarah pada pengkultusan ilmuwan barat sehingga sedikit sekali ilmuwan Muslim yang bisa dilacak kontribusi pemikirannya pada pendidikan Islam di Indonesia. Ilmuwan Barat dijadikan kiblat untuk menata ataupun merekonstruksi pendidikan Islam, yang pada saat ini dinggap telah ketinggalan jauh dengan dunia Barat.

Standar ideal untuk pendidikan Islam diukur dengan konsep serta rumusan pendidikan Barat, jelas ideologi Barat secara tidak langsung dipaksakan untuk dicangkokkan pada pendidikan Islam. Padahal, dari sisi kesejarahan dan kultur yang dibangun sangat jauh berbeda dengan realitas yang ada di Barat. Setidaknya, walau hal itu sudah menjadi keniscayaan, minimal ada standar atau filter yang mampu untuk menjinakkan hal tersebut. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah melalui proses konsumennya tidak kaget ketika melihat fenomena yang berbeda akibat sebuah proses peleburan.

Dari sisi para Ilmuwan, Azyumardi Azra, terlalu menempatkan intelektual Indonesia sebagai kelas nomor dua dalam srata keilmuannya. Padahal, banyak sumbangan-sumbangan mereka dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, proses menomorduakan para intelektual domestik akan berimplikasi pada kredibilitas mereka dalam dunia keilmuan. Tidak heran jika seseorang lebih lihai dan *keren* ketika menyebutkan tokoh barat ketimbang tokoh lokal yang itu juga setidaknya juga mempunyai sebuah kearifan juga.

Untuk mencapai orientasi tersebut, pendidikan dalam proses modernisasi mengalami perubahan fungsional antarsistem. Perubahan tersebut pada tingkat konseptual dapat dirumuskan dengan menggunakan pendekatan sistem yang dalam hal ini bisa dilihat dari kajian-kajian modrenisasi dengan menemukan variabelnya yang relevan terhadap perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Variabel-variabel di bawah ini dapat diterapkan dalam agenda modernisasi pendidikan Islam dalam konteks Indonesia secara keseluruhan di antaranya.

1. Ideologis-Normatif. Tujuan-tujuan ideologis tentu ini dapat diekspresikan dalam norma-norma nasional.
2. Mobilisasi Politik. Kebutuhan bagi modernisasi menuntut sistem pendidikan untuk memproduksi kepemimpinan modernisasi.
3. Mobilisasi Ekonomi. Tuntutan kerja yang sangat tinggi menuntut sistem pendidikan untuk mempersiapkan anak didik menjadi SDM yang unggul dan mampu mengisi berbagai lapangan kerja yang tercipta dalam proses pembangunan.
4. Mobilisasi Sosial. Mobilisasi sosial dalam modernisasi menuntut pendidikan untuk memberikan akses dan *value* ke arah tersebut.
5. Mobilisasi Kultural. Modernisasi yang menimbulkan perubahan-perubahan menuntut sistem pendidikan untuk mampu memelihara stabilitas dan mengembangkan warisan budaya dalam pembangunan.

Pada saat yang sama, hal tersebut di atas tercakup dalam transformasi sistem pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Modernisasi administratif
2. Diferensiasi struktural
3. Ekspansi kapitalis

Transformasi ini dengan mempertimbangkan semua variabel tersebut yang pada gilirannya akan menghasilkan *output* pendidikan yang merupakan input bagi masyarakat sebagai berikut.

1. Perubahan sistem nilai.
2. *Output* Politik
3. *Output* ekonomi
4. *Output* sosial
5. *Output* kultural.<sup>148</sup>

Menurut Azyumardi Azra, respons pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam dan perubahan sosial ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia sejak awal abad ini mencakup: *pertama*, pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan *vocational*; *kedua*, pembaruan metodologi, seperti sistem klasikal, penjenjangan; *ketiga*, pembaruan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan; dan *keempat*, pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga yang mencakup fungsi sosial-ekonomi.<sup>149</sup>

#### 4. Madrasah Menurut Azyumardi Azra

Sedangkan, dalam modernisasi madrasah terdapat beberapa pemikiran Azyumardi Azra yang sangat penting untuk dikembangkan adalah kurikulum harus ada

---

<sup>148</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2012), 32-36

<sup>149</sup> *Ibid.*, 128

spesifikasi atau penekanan pada kurikulum MI, MTs, dan MA. Kurikulum MI dan MTs lebih ditekankan pada transfer pengetahuan dan pembentukan watak. Sedangkan MA, selain dari keduanya kompetensi tersebut harus ditekankan pada pembentukan dan pembinaan keterampilan yang kini lebih dikenal dengan *life skill*. Maka dengan demikian, madrasah yang menurut Azyumardi Azra haruslah mempunyai sebuah kurikulum yang sesuai dengan jenjang yang dilakukan peserta didik.

Azyumardi Azra menyatakan, bahwa dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, pengertian kurikulum harus disesuaikan dengan konteks yang berkembang. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok sekolah pada masing-masing jenjang fokus dan orientasi pokok kurikulum. Sekolah dengan demikian, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk pengembangan, perencanaan, penerapan dan evaluasi kurikulum yang tentunya harus dengan konsisten tidak mengabaikan standar dasar nasional.<sup>150</sup>

Demikian, uraian dalam analisis dari penulis yang perlu dicatat bahwa ini masih jauh dari sempurna. Modernisasi yang dilakukan oleh Azyumardi Azra tentunya tidak semuanya baik, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang perlu kita kaji secara lebih dalam lagi. Maka, dengan ini, penulis yang masih tahap belajar, juga perlu untuk lebih tahu jauh dan mendalam tentang khazanah keilmuan yang tumbuh dalam

---

<sup>150</sup> Azyumardi Azra, *Pradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan modernisasi*, (Jakarta: Kompas, 2002), 97

dunia Muslim maupun dunia Barat yang sekarang masih menjadi kiblat ilmu pengetahuan.

Berdasarkan pada fakta pemikiran tersebut dan juga elaborasi yang telah dilaksanakan, pada tataran ini dapat dijadikan tawaran bagi dua pihak. Pertama, pihak pemerhati pendidikan. Karena modernisasi merupakan keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar, setidaknya pemerhati pendidikan pengawal proses modernisasi pendidikan Islam di tiap-tiap lembaga pendidikan Islam. Kedua, untuk para pakar pesantren dan madrasah. Pesantren adalah pendidikan alternatif yang akan dipilih oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pesantren dan madrasah harus sesegera mungkin melakukan modernisasi.

### **C. Analisis Perbandingan**

#### **1. Perbedaan Tentang Modernisasi Pesantren & Madrasah Menurut A.**

##### **Mukti Ali dan Azyumardi Azra**

berikut ini beberapa poin yang membedakan antara pemikiran A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra, tentang pesantren dan madrasah. diantaranya:

##### **a. Modernisasi Lembaga Pesantren Menurut A. Mukti Ali**

Meskipun A. Mukti Ali tetap menjaga kemandirian pesantren dengan mempertahankan sistem atau bahkan kurikulum yang sudah berjalan, keinginannya untuk membawa pesantren ke pusat perhatian pemerintah Orde Baru sangat besar. Melalui SKB menteri Agama dengan Menteri pertanian No. 34 A Tahun 1972,

mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan pondok pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Kerja sama itu juga dilakukan dengan departemen-departemen lain, yang intinya ditujukan dengan untuk memberikan pembinaan-pembinaan manajerial bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam.<sup>151</sup>

Menurut Mukti Ali, perubahan dan penyempurnaan dalam segala aspek kehidupan sebagai bangsa yang merdeka telah banyak dilakukan, tetapi perubahan yang tampak pada sistem pengajaran dan pendidikan di pondok pesantren adalah dari pondok pesantren murni berubah atau ditambah dengan madrasah. Ini dapat dikatakan bahwa perubahan itu lebih bersifat peningkatan dan bukan bersifat mendasar, dalam arti perubahan dalam cara memberikan pengertian tentang ilmu Agama. Memang di beberapa pondok pesantren telah didirikan Universitas yang selain membuka Fakultas-fakultas yang berhubungan dengan Agama Islam juga membuka Fakultas-fakultas yang mereka katakan Umum, seperti Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial-Politik dan sebagainya. Rupa-rupanya pengetahuan yang dikatakan Umum itu belum bisa dimasukkan dalam ilmu Agama. Dikotomi dalam bidang ilmu, sebagai produk dari sekularisme, ini adalah barangkali akibat politik dan sistem pendidikan Belanda di Indonesia. Tetapi sebenarnya keadaan semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Hal itu juga terjadi di dunia Islam lainnya.

b. Modernisasi Lembaga Pesantren Menurut Azyumardi Azra

---

<sup>151</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 353

Dalam modernisasi pesantren terdapat beberapa pemikiran Azyumardi Azra yang sangat penting untuk dikembangkan. Menurut Azyumardi Azra, respons pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam dan perubahan sosial ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia sejak awal abad ini mencakup: *pertama*, pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan *vocational*; *kedua*, pembaruan metodologi, seperti sistem klasikal, penjenjangan; *ketiga*, pembaruan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan; dan *keempat*, pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga yang mencakup fungsi sosial-ekonomi.<sup>152</sup>

Dari pemaparan tentang perbedaan modernisasi pesantren di atas, penulis berkesimpulan bahwa diantara kedua tokoh A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra mempunyai sebuah pandangan tersendiri dalam menentukan sebuah arah bagi lembaga pendidikan Islam, yang dalam hal ini pesantren. A. Mukti Ali kalau kita lihat penjelasan diatas tidak terlalu mendasar dalam membaharui pesantren. beliau hanya menekankan pada peningkatan dalam arti perubahan dalam cara memberikan pengertian tentang ilmu Agama.

Sedangkan Azyumardi Azra kalau kita lihat dari penjelasan diatas, tentang pembaharuan pesantren lebih kepada perombakan yang dalam hal ini, lebih mendasar dari apa yang dilakukan A. Mukti Ali. Kalau kita lihat, seperti pembaruan substansi atau isi yang dimasukkan subjek umum dan vocational, metodologinya, seperti sistem

---

<sup>152</sup>Azumardi Azra *Paradigma Baru.*, 128

klasikal, perjenjangan. Kelembagaan, dan fungsi, dari fungsi kependidikan ke fungsi sosial ekonomi.

Dalam hal modernisasi madrasah ini, setidaknya ada dua poin yang membedakan antara kedua tokoh A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra Seperti:

a. Kurikulum Menurut A. Mukti Ali

kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran Agama. dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara demikian, pengakuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat.<sup>153</sup>

b. Kurikulum Menurut Azyumardi Azra

Kurikulum merupakan pemandu utama bagi penyelenggaraan pendidikan secara formal yang menjadi pedoman bagi setiap guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Lebih dari itu, kurikulum merupakan aktualiasi dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kurikulum memuat sejumlah mata pelajaran, garis pokok program pengajaran dalam satu pekan, selama satu tahun ajaran pada jenjang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi minimal yang mesti dimiliki oleh peserta didik untuk

---

<sup>153</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat* 352-353

menamatkan tingkatan pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, harus ada spesifikasi atau penekanan pada kurikulum MI, MTs, dan MA yang membedakan dengan esensi kurikulum pada sekolah-sekolah umum. Kurikulum MI dan MTs lebih ditekankan pada transfer pengetahuan dan pembentukan watak. Sedangkan, MA selain dari kedua kompetensi tersebut harus ditekankan pada pembentukan dan pembinaan keterampilan yang kini *booming* dikenal dengan *life-skill*.<sup>154</sup>

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan pengertian kurikulum harus disesuaikan dengan konteks yang berkembang. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok sekolah pada masing-masing jenjang menjadi fokus dan orientasi pokok kurikulum. Sekolah dengan demikian, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk pengembangan, perencanaan, penerapan dan evaluasi kurikulum yang tentunya harus sesuai dengan konsisten dengan tidak mengabaikan standar dasar nasional.<sup>155</sup>

Untuk mengambil konklusi dari pengembangan kurikulum Berbasis Sekolah (*school-based curriculum*) merupakan inisiatif terbaik bagi pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan madrasah pada masa otonomi. Desentralisasi yang terus menemukan momentumnya dan tidak bisa dihindarkan lagi. Oleh sebab itu, sebagai pendidikan yang berbasis masyarakat, madrasah umumnya memiliki potensi lebih besar tidak hanya untuk mengembangkan pendidikan Berbasis Sekolah, tetapi

---

<sup>154</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Kompas, 2006), 218

<sup>155</sup> *Ibid.*, 97

lebih luas lagi, yaitu meningkatkan kualitas pendidikannya dengan mengikutsertakan seluruh elemen yang ada.<sup>156</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan yang terjadi di ke-dua tokoh tentang modernisasi madrasah, itu terletak pada kurikulumnya. Tapi, perbedaan tentang kurikulum ini perlu kita pahami secara teliti. Karena, mengingat pada perbedaan yang hanya sebatas pada spesifikasi tingkatan-tingkatan sekolah. Oleh karena itu, menurut penulis perbedaan yang dijelaskan diatas, itu hanya sekedar sebuah perbedaan yang disebabkan oleh faktor perkembangan zaman yang selalu menuntut untuk menciptakan sebuah madrasah yang dapat menjawab tantangan dalam kehidupan yang semakin maju.

Tabel 1.1  
Resume Tabel Perbedaan

No	Perbedaan	A. Mukti Ali	Azyumardi Azra
1	Kebijakan Tentang Modernisasi Lembaga Pesantren	perubahan dan penyempurnaan dalam segala aspek kehidupan sebagai bangsa yang merdeka telah banyak dilakukan, tetapi perubahan yang tampak pada sistem pengajaran dan pendidikan di pondok pesantren adalah dari pondok	respons pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam dan perubahan sosial ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia sejak awal abad ini mencakup:

<sup>156</sup> Ibid., 100

		<p>pesantren murni berubah atau ditambah dengan madrasah. Ini dapat dikatakan bahwa perubahan itu lebih bersifat peningkatan dan bukan bersifat mendasar, dalam arti perubahan dalam cara memberikan pengertian tentang ilmu Agama</p>	<p><i>pertama</i>, pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan <i>vocational</i>; <i>kedua</i>, pembaruan metodologi, seperti sistem klasikal, penjenjangan; <i>ketiga</i>, pembaruan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan; dan <i>keempat</i>, pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga yang mencakup fungsi sosial-ekonomi.</p>
2	Kurikulum pada madrasah	<p>Kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran Agama. dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam</p>	<p>Kurikulum merupakan pemandu utama bagi penyelenggaraan pendidikan secara formal yang menjadi pedoman bagi setiap guru,</p>

		<p>jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara demikian, pengakuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat</p>	<p>kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Lebih dari itu, kurikulum merupakan aktualisasi dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selain itu Azyumardi Azra juga menekankan pada spesifikasi pada kurikulum. Kurikulum MI dan MTs lebih ditekankan pada transfer pengetahuan dan pembentukan watak. Sedangkan, MA selain dari kedua kompetensi tersebut harus ditekankan pada pembentukan dan pembinaan keterampilan yang kini <i>booming</i> dikenal dengan <i>life-skill</i>.</p>
--	--	--	---

## 2. Persamaan Tentang Modernisasi Pesantren & Madrasah Menurut A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra

Selain perbedaan yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga persamaan yang ada pada kedua tokoh A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra. Yang dalam hal ini, tentang persamaan modernisasi pesantren dan madrasah. diantaranya:

### a. Metodologi (Sistem Klasikal) Menurut A. Mukti Ali

Konsep modernisasi pesantren menurut A. Mukti Ali. Dalam perjalanan sejarah, pada permulaan abad XX sistem pengajaran di pondok pesantren itu mengalami perubahan menjadi *madrasah*, yaitu sistem pengajaran yang memakai jenjang, ada ujian, ada absensi, ada rapot, dan sebagainya. Sudah barang tentu dilihat dari segi pengajaran, sistem madrasah ini jauh lebih baik dari pada sistem *wetonan* dan *sorongon*. Karena pengajaran dengan sistem madrasah itu berjenjang dan kecakapan santri dapat diukur dan diketahui.

Saya kira sistem pendidikan dan pengajaran Agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren, sedangkan sistem pengajaran yang mengikuti sistem madrasah, jelasnya *madrasah dalam pondok pesantren adalah bentuk sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam yang paling baik di Indonesia ini.*

### b. Metodologi (Sistem Klasikal) Menurut Azyumardi Azra

Pada akhir abad ke-19 M dan Awal abad ke-20 M itulah yang memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri: digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran-pelajaran, penggunaan bangku, dan lain sebagainya.

Maka dengan penjelasan diatas, maka kedua tokoh mempunyai kesamaan dalam hal metodologi (sistem Klasikal). Dengan demikian apa yang dimaksud diatas seperti, adanya kelas, dan lain sebagainya. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa terdapa kesamaan diantara dua tokoh A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra yang dalam hal ini, sistem klasikal, jenjang (metodologi).

Meskipun ada beberapa hal yang membedakan diantara pemikiran kedua tokoh tersebut, namun di satu sisi terdapat banyak pula persamaannya. Beberapa persamaan diantara pemikiran A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra, diantaranya:

- c. Integrasi Pendidikan Islam Ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional Menurut A. Mukti Ali

*Pertama*, Mukti Ali telah melakukan kebijakan tentang pembenahan lembaga pendidikan Islam. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mengambil inisiatif untuk merebut berbagai rencana itu dengan departemen lain, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah melalui proses panjang dan hati-hati, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam

Negeri, atau yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, No. 6 Tahun 1975, dan No.037/U/a975. Dalam SKB Tiga Menteri tersebut ditegaskan: (1) Agar ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang singkat; (2) Agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas; dan (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran Agama.

*Kedua*, Melalui kebijakan SKB ini paling kurang ada dua hal pending bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam jangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. *Kedua*, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharpkan pembenahan madrasah untuk ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara demikian, pengakuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat.<sup>157</sup>

#### d. Integrasi Pendidikan Islam Ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional Menurut Azyumardi Azra

*Pertama*, Namun dalam prinsipnya, tidak ada dikotomi dalam madrasah. Artinya, madrasah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah sama dengan sekolah umum terutama dalam hal ini yang berkenaan dengan kurikulum. Sebab,

<sup>157</sup>Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*, 352

secara prinsipil tidak ada pernyataan tertulis apakah eksistensi sekolah umum dengan madrasah atau pesantren itu berbeda. Madrasah adalah sekolah umum yang eksistensinya sama dengan sekolah *plus*.<sup>158</sup> Dengan apa yang telah di sebutkan di atas, bahwa sanya tidak adanya sebut di kotomi antara madrasah dengan sekolah terutama yang berkenaan dengan kurikulum. Maka dari itu, sebuah nilai plus bagi madrasah jika memasukkan mata pelajaran umum kepada kurikulum madrasah.

Tabel 1.2  
Resume Tabel Persamaan

No	Persamaan	B. Mukti Ali	Azyumardi Azra
1	Metodologi (Sistem Klasikal)	abad XX sistem pengajaran di pondok pesantren itu mengalami perubahan menjadi madrasah, yaitu sistem pengajaran yang memakai jenjang, ada ujian, ada absensi, ada raport, dan sebagainya. <i>madrasah dalam pondok pesantren adalah bentuk sistem pengajaran dan</i>	Awal abad ke- 20 M itulah yang memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia sudah mengadopsi sistem sekolah modern dengan ciri-ciri: digunakannya sistem kelas, pengelompokan pelajaran-

<sup>158</sup>Abdul Munir Mulkan dkk, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kali Jaga dan Pustaka Pelajar, 1998), 79

		<i>pendidikan agama Islam yang paling baik di Indonesia ini.</i>	pelajaran, penggunaan bangku, dan lain sebagainya.
2	Integrasi Pendidikan Islam Ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional	Melalui kebijakan SKB ini paling kurang ada dua hal pending bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. <i>Pertama</i> , dalam jangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. <i>Kedua</i> , dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara	tidak ada dikotomi dalam madrasah. Artinya, madrasah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah sama dengan sekolah umum terutama dalam hal ini yang berkenaan dengan kurikulum. Sebab, secara prinsipil tidak ada pernyataan tertulis apakah eksistensi sekolah umum dengan madrasah atau pesantren itu berbeda. Madrasah adalah sekolah umum yang eksistensinya sama dengan sekolah <i>plus</i> .

	demikian, masyarakat keberadaan pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat	pengakuan terhadap lembaga di masa mendatang semakin kuat
--	---	---

### **3.Keunggulan Pemikiran A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra**

Selanjutnya, peneliti menambahkan sebuah paparan mengenai keunggulan yang ada dalam pemikiran A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra. Yaitu:

#### **a. A. Mukti Ali**

Ada beberapa yang menurut peneliti terdapat kelebihan atau keunggulan dalam mengkaji pemikiran A. Mukti Ali dan Azyumardi Azra dalam menguraikan seputar konsep modernisasi pendidikan Islam diantaranya, yaitu:

*Pertama*, masalah kebijakan, Mukti Ali telah melakukan kebijakan tentang pembenahan lembaga pendidikan Islam. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mengambil inisiatif untuk merebut berbagai rencana itu dengan departemen lain, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah melalui proses panjang dan hati-hati, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, No. 6 Tahun 1975, dan No.037/U/a975. Dalam SKB Tiga Menteri tersebut ditegaskan: (1) Agar ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan

ijazah sekolah umum yang singkat; (2) Agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas; dan (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum, dan 30% pelajaran Agama. Melalui kebijakan SKB ini paling kurang ada dua hal pending bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam jangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. *Kedua*, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara demikian, pengakuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat.<sup>159</sup>

*Kedua*, dilihat dari segi perjalanan kariernya, Mukti Ali adalah seorang tenokrat yang menjabat, yakni bahwa dengan kemampuan akademiknya ia berupaya membangun kemajuan bangsa, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Selain memiliki gagasan dan pemikiran dalam bidang pengembangan hubungan dan toleransi antara umat beragama, Mukti Ali juga memiliki gagasan dan pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

---

<sup>159</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat* 352-353

Oleh karena itu, tidak heran kalau Mukti Ali memiliki keunggulan dalam pemikirannya baik dalam Studi perbandingan maupun dalam Pendidikan Islam.

b. Azyumardi Azra

Ada beberapa yang menurut peneliti terdapat kelebihan atau keunggulan dalam mengkaji pemikiran Azyumardi Azra dalam menguraikan seputar konsep modernisasi pendidikan Islam diantaranya, yaitu:

*Pertama*, dalam hal, pembaharuan tentang pesantren Azyumardi Azra menyatakan sebagai berikut: *pertama*, pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan *vocational*; *kedua*, pembaruan metodologi, seperti sistem klasikal, penjenjangan; *ketiga*, pembaruan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan; dan *keempat*, pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga yang mencakup fungsi sosial-ekonomi.<sup>160</sup>

*Kedua*, tentang kurikulum, Menurut Azyumardi Azra Kurikulum merupakan pemandu utama bagi penyelenggaraan pendidikan secara formal yang menjadi pedoman bagi setiap guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Lebih dari itu, kurikulum merupakan aktualiasi dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kurikulum memuat sejumlah mata pelajaran, garis pokok program pengajaran dalam satu pekan, selama satu tahun ajaran pada jenjang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, atau

---

<sup>160</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana, 2012), 128

kompetensi minimal yang mesti dimiliki oleh peserta didik untuk menamatkan tingkatan pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, harus ada spesifikasi atau penekanan pada kurikulum MI, MTs, dan MA yang membedakan dengan esensi kurikulum pada sekolah-sekolah umum. Kurikulum MI dan MTs lebih ditekankan pada transfer pengetahuan dan pembentukan watak. Sedangkan, MA selain dari kedua kompetensi tersebut harus ditekankan pada pembentukan dan pembinaan keterampilan yang kini *booming* dikenal dengan *life-skill*.<sup>161</sup>

#### **4. Relevansi Modernisasi Pendidikan Islam Menurut A. Mukti Ali Dan Azyumardi Azra Dengan Pendidikan Sekarang**

Tantangan bagi masyarakat muslim di bagian dunia mana pun untuk mengembangkan sains dan teknologi sekarang dan masa datang tidak lebih ringan. Memang dalam dasawarsa terakhir di kalangan dunia Islam muncul dan berkembang kesadaran tentang urgensi rekonstruksi peradaban islam melalui penguasaan sains dan teknologi.<sup>162</sup> Maka dari itu, Modernisme dan modernisasi pendidikan Islam merupakan ke-niscayaan sejarah yang penuh perubahan. Dilihat dari perspektif perubahan dan perkembangan kebudayaan, kelembagaan pendidikan tradisional islam sulit untuk *survive* tanpa modernisasi.<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> Azyumardi Azra, *Paradigma Baru*, 218

<sup>162</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi*, 11

<sup>163</sup> *Ibid.*, 38-39

Pada awal abad ke-20, mulai berembus ide-ide modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Ide ini muncul dikarenakan ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan tradisional. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan tradisional— kurang relevan ketika masih tetap diterapkan pada zaman modern ini.

Melalui kebijakan SKB ini paling kurang ada dua hal pending bagi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam jangka integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. *Kedua*, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar, diharapkan pembenahan madrasah untuk ditransformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia Muslim akan dapat diwujudkan. Dengan cara demikian, pengakuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam di masa mendatang semakin kuat.

Adapun Respons Azyumardi Azra terhadap modernisasi pendidikan Islam dan perubahan sosial ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia sejak awal abad ini mencakup: *pertama*, pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan *vocational*; *kedua*, pembaruan metodologi, seperti sistem klasikal, penjenjangan; *ketiga*, pembaruan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan; dan *keempat*, pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga yang mencakup fungsi sosial-ekonomi

Maka dari itu, sangat relevan jika pemikiran kedua tokoh tersebut kita hadirkan pada dunia pendidikan sekarang. Karena mengingat pemikiran yang beliau pakai lebih kepada pemikiran reformis. Maka dari itu, sangatlah relevan jika dihubungkan dengan pendidikan sekarang.

